



Mengawal Jalannya Hukum Ketatanegaraan dalam program kerja KDM Barak Militer dalam Persepektif Otonomi Daerah

Muhammad Dewa Saputra¹, Anita Trisiana², Yulika Revina Widiarani³, Kezia Agna Seviolla⁴, Meida Nelly Aprillia⁵, Nurul Astuti⁶, Yunita Priscilia Kristiani Gea⁷

Universitas Slamet Riyadi UNISRI Surakarta, Indonesia

Email Korespondensi: sdewa3919@gmail.com, anita.trisiana@gmail.com, yulikarevina694@gmail.com, agnaseviolla@gmail.com, nellyapriameida@gmail.com, nurulastuti306@gmail.com, yunitaprisiliag@gmail.com

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 07 September 2025

ABSTRACT

Character education is pivotal for fostering integrity, discipline, and responsibility among youth, while regional autonomy enables context-sensitive policy innovations in character building. This study analyzes the effectiveness of the "Military Barracks" (KDM) program in shaping students' character, discipline, and self-reliance and examines its implementation dynamics within regional autonomy. A qualitative case-study approach was employed at State Senior High School 8 Surakarta; participants (teachers, program participants, and parents) were purposively selected, data were collected via open-ended questionnaires and in-depth interviews, and thematically analyzed with source triangulation to ensure validity. Findings indicate a highly positive response 96.7% of respondents deemed the program effective in improving discipline, fostering positive character, and instilling moral values yet concerns remain regarding potential psychosocial effects and governance/child-protection issues, underscoring the need to balance disciplinary enforcement with humanistic approaches.

Keywords: Character Education; Discipline; Youth; Regional Autonom

ABSTRAK

Pendidikan karakter berperan strategis dalam membentuk generasi muda berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab, sementara otonomi daerah memberi ruang inovasi kebijakan pembinaan yang adaptif terhadap konteks lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program "Barak Militer" (KDM) dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian siswa serta menelaah dinamika implementasinya dalam kerangka otonomi daerah. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di SMA Negeri 8 Surakarta; informan dipilih secara purposive (pendidik, siswa peserta, orang tua), data dihimpun melalui kuesioner terbuka dan wawancara mendalam, dianalisis secara tematik dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan. Hasil menunjukkan respons sangat positif terhadap KDM – 96,7% responden menilai program efektif dalam meningkatkan disiplin, membentuk karakter positif, dan menanamkan nilai moral; namun terdapat perhatian terhadap potensi dampak psikososial serta isu tata kelola dan perlindungan hak anak, sehingga dibutuhkan keseimbangan antara penegakan disiplin dan pendekatan humanistik.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter; Kedisiplinan; Remaja; Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab. Lickona (2011) menjelaskan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya sistematis dan terencana untuk membentuk nilai, sikap, dan perilaku positif pada peserta didik. Proses pembentukan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga institusi pendidikan dan lingkungan sosial. Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan sosial, berbagai strategi pendidikan karakter terus dikembangkan untuk menjawab tantangan kenakalan remaja dan degradasi moral. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi pendidikan karakter yang tepat dapat menurunkan perilaku menyimpang sekaligus meningkatkan kesadaran etika pada generasi muda (Berkowitz & Bier, 2021).

Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah lokal untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang inovatif dan adaptif sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah memungkinkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk merancang program-program pembinaan karakter yang relevan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Sejalan dengan hal ini, berbagai daerah mulai menerapkan kebijakan strategis guna meningkatkan kualitas pendidikan karakter peserta didik. Studi internasional menegaskan bahwa otonomi pendidikan yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan efektivitas kurikulum, kinerja sekolah, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia (OECD, 2022). Dengan demikian, penerapan program berbasis lokal menjadi langkah strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional sekaligus menjawab kebutuhan karakter bangsa.

Salah satu kebijakan inovatif dalam konteks ini adalah program “Barak Militer” (KDM) yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Program ini dirancang untuk membentuk karakter disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab siswa melalui pendekatan berbasis kedisiplinan ala militer, namun tetap mengedepankan prinsip pendidikan dan perlindungan anak. Program ini memanfaatkan lingkungan barak militer sebagai sarana pembinaan yang terstruktur dan sistematis, meliputi pelatihan fisik, penguatan spiritual, konseling psikologis, dan penanaman nilai-nilai moral. Pendekatan ini sesuai dengan temuan studi internasional yang menegaskan bahwa program intervensi berbasis disiplin dapat meningkatkan ketahanan mental dan keterampilan sosial pada remaja yang memiliki permasalahan perilaku (Jones & Kahn, 2021).

Meskipun demikian, pelaksanaan program KDM menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi. Sebagian pihak memandang bahwa pendekatan berbasis semi-militer efektif dalam meningkatkan kedisiplinan dan pembentukan karakter, sementara pihak lain menilai bahwa metode ini berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan mengabaikan hak-hak anak. Temuan serupa juga ditemukan dalam studi internasional, di mana program berbasis kedisiplinan ketat cenderung memerlukan keseimbangan antara penegakan aturan dan pendekatan humanistik agar tidak menimbulkan dampak negatif pada

perkembangan psikososial remaja (UNICEF, 2023). Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini menuntut adanya pengawasan ketat dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, tenaga pendidik, psikolog, dan keluarga.

Selain itu, relevansi program KDM dalam konteks otonomi daerah memberikan ruang evaluasi yang lebih luas. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menginisiasi kebijakan pembinaan karakter, namun pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan stakeholder terkait. Studi oleh World Bank (2023) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan berbasis lokal sangat ditentukan oleh keterlibatan multi-pihak, termasuk peran sekolah, keluarga, dan pemerintah daerah. Pendekatan terintegrasi seperti ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mengoptimalkan potensi peserta didik, dan menekan angka kenakalan remaja secara signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program “Barak Militer” dalam membentuk karakter, disiplin, dan kemandirian siswa di Jawa Barat. Penelitian ini juga mengeksplorasi perspektif berbagai pihak, termasuk siswa, tenaga pendidik, dan orang tua, terhadap implementasi program, sekaligus mengkaji tantangan yang muncul dalam kerangka otonomi daerah. Dengan memahami dinamika pelaksanaan kebijakan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pendidikan karakter yang lebih humanis, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan konteks pendidikan Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi program “Barak Militer” yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam pembentukan karakter siswa. Lokasi penelitian ditetapkan di SMA Negeri 8 Surakarta karena sekolah tersebut terlibat langsung dalam pelaksanaan program dan menyediakan konteks empiris yang kaya. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, melibatkan tenaga pendidik, siswa peserta program, dan orang tua yang dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terbuka untuk mengeksplorasi persepsi dan perubahan perilaku siswa, serta wawancara mendalam dengan guru, orang tua, dan siswa guna memperoleh data kualitatif yang komprehensif mengenai pengalaman dan dampak program. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) melalui tahapan pengorganisasian data, pemaparan temuan, dan penarikan kesimpulan, sedangkan validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak untuk memastikan akurasi dan reliabilitas data (Patton, 2002; Yin, 2018). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan dinamika sosial yang kompleks terkait efektivitas program dalam membentuk karakter dan kedisiplinan siswa secara lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program barak Militer oleh Kang Dedi Mulyadi (KDM) menuai berbagai pro dan kontra. Ada yang berpendapat bahwa Program Barak Militer sudah mulai tepat sasaran dan menjadi solusi pendidikan karakter anak remaja yang tergolong nakal karena KDM sendiri yang memastikan hak dan tumbuh kembang anak akan tetap terjaga. Namun ada juga yang kontra dengan program satu ini seperti pendapat Ina Liem bahwa program ini berkesan hukuman bagi anak remaja yang bermasalah sedangkan bukan orang tua yang memasukan mereka ke barak militer untuk menghukum anaknya. Tapi membangun leaderdhip yang kuat dan memperkental karakter kebangsaan. Hasil penelitian dan wawancara kami kepada salah satu tenaga pendidik di SMA Negeri 8 Surakarta lebih condong terhadap kontra. Karena menurutnya (tenaga pendidik) pendidikan untuk anak remaja pada umumnya yang terkesan mengikuti dan menyesuaikan cara belajar remaja sangat berbeda dengan pendidikan militer yang terkesan menghukum remaja dan keras hingga dapat memengaruhi kesehatan mental dan hak remaja. Dan kurang setuju jika program ini berlangsung lebih lama. Meski KDM menjamin hak hak pembelajaran remaja terpenuhi, tapi tetap tidak terhindarkan dari kemungkinan terburuk dari program tersebut. Dan yang dibutuhkan remaja bukanlah hukuman yang keras atau didikan keras seperti militer, namun pendidikan yg dapat menyesuaikan type atau cara belajar remaja. Program Barak Militer tidak melanggar UU perlindungan anak, namun penerapan pendidikan barak militer belum tentu dapat sesuai dengan kaidah UU Perlindungan Anak.

Bagaimana dengan orangtua yang terkesan sudah tidak sanggup mendidik anaknya karena sudah di luar batas kemampuan orangtua? Pertanyaan itu terjawab dengan harapan bahwa tenaga pendidik dapat bekerjasama dengan orangtua demi satu tujuan. Karena tenaga pendidik tidak hanya guru di sekolah dan orangtua saja dan diharapkan semua orang yang ada di lingkungan remaja dapat mendukung perkembangan remaja tersebut. Tugas orangtua adalah yang paling utama karena orangtua adalah orang terdekat dalam perkembangan remaja dan sangat berpengaruh bagi pembentukan jati diri remaja. Lingkungan kelahiran seorang anak ditentukan oleh orangtua, dan lingkungan perkembangan anak juga dari keputusan orangtua, hingga lingkaran pergaulan anak mendapat campur tangan orangtua. Jadi orangtua menjadi faktor utama perkembangan anak.

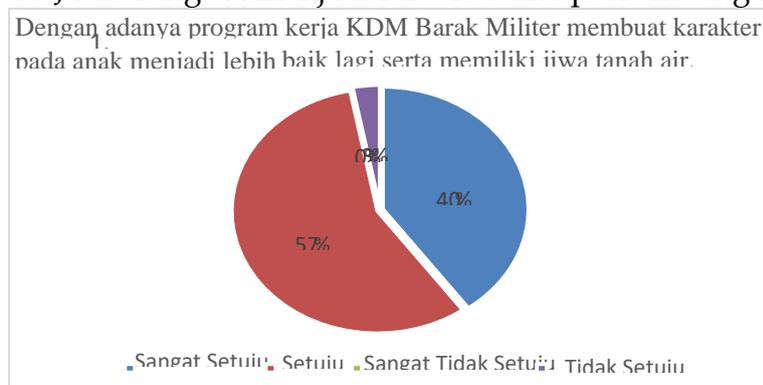


Diagram 1

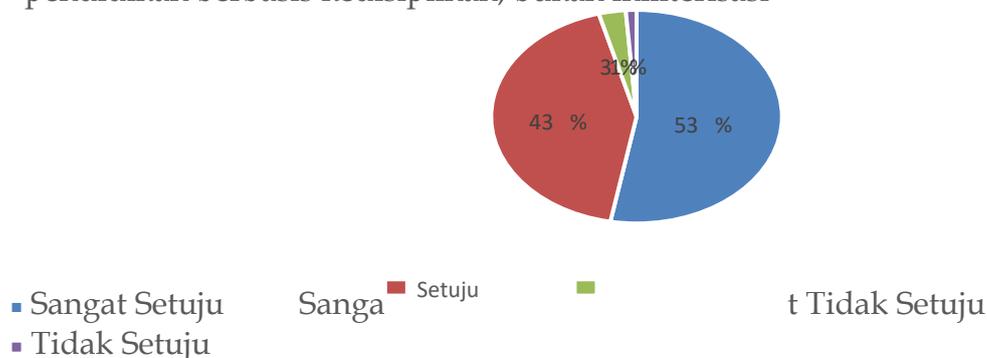
Merujuk pada hasil survei yang ditampilkan grafik yang ditampilkan diatas, bisa disimpulkan bahwa mayoritas responden memberikan respon positif tentang program kerja KDM Barak Militer, khususnya dalam membentuk karakter anak menjadi lebih baik dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dari total 30 responden, sebanyak 56,7% menyatakan setuju dan 40% sangat setuju, sementara hanya 3,3% yang tidak setuju, dan tidak ada yang sangat tidak setuju. Temuan tersebut memberi gambaran masyarakat, khususnya para peserta survei, melihat program ini sebagai bentuk pendidikan non-formal yang mampu menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan nasionalisme. Pendekatan berbasis barak militer yang digunakan oleh KDM dinilai efektif dalam membina remaja yang berperilaku menyimpang agar dapat bertransformasi menjadi individu yang lebih baik, terarah, dan memiliki integritas kebangsaan. Program ini juga mencerminkan bentuk intervensi kebijakan daerah dalam mendukung pembangunan karakter generasi muda melalui strategi yang bersifat preventif dan korektif. Dalam konteks otonomi daerah, kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengisi kekosongan sistem pendidikan karakter formal yang belum sepenuhnya efektif.



Diagram 2

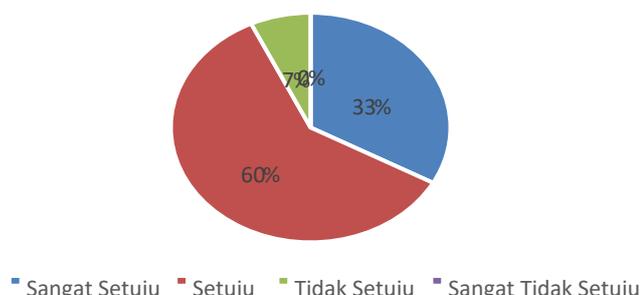
Merujuk pada hasil survei grafik yang ditampilkan diatas, terlihat bahwa sebagian besar responden percaya bahwa keberadaan barak militer dalam program kerja KDM dapat membantu orang tua dalam mendidik anak-anak yang tergolong “spesial” atau berperilaku nakal. Sebanyak 56,7% responden menyatakan setuju dan 40% lainnya sangat setuju, menandakan bahwa pendekatan ini dinilai efektif sebagai bentuk pendampingan keluarga dalam pembinaan perilaku remaja. Hanya sebagian kecil yang tidak setuju dan sangat tidak setuju, menunjukkan tingkat penolakan yang sangat rendah. Program semacam ini dianggap sebagai solusi alternatif yang bersifat edukatif sekaligus korektif bagi anak-anak yang kesulitan mengikuti pola asuh konvensional. Pendekatan ini sekaligus mendukung fungsi sosial pemerintah daerah dalam membantu keluarga membentuk karakter anak melalui metode yang lebih tegas namun tetap dalam koridor pendidikan dan pembinaan moral.

Program KDM bertujuan mengawal jalannya hukum ketatanegaraan dengan menciptakan karakter disiplin, siswa dan menghidupkan kembali identitas remaja generasi penerus bangsa melalui pendekatan pendidikan berbasis kedisiplinan, bukan militerisasi

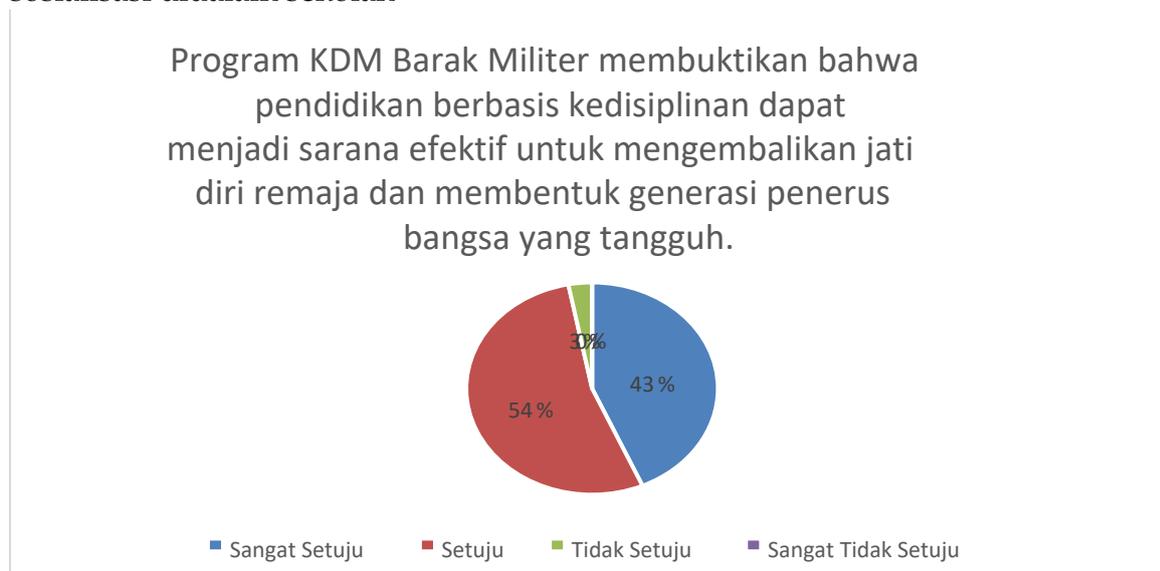


Pada hasil survei yang ditampilkan pada gambar, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan program KDM Barak Militer bertujuan mengawal jalannya hukum ketatanegaraan dengan pembentukan karakter siswa yang memiliki disiplin, siswa pendidikan berbasis kedisiplinan bukan militerisasi perang. Dari total 30 responden sebanyak 56,7% menyatakan setuju dan 40% sangat setuju, sementara hanya 3,3% yang tidak setuju, dan tidak yang sangat tidak setuju. Dengan ini menunjukkan masyarakat, khususnya para peserta survei, melihat program ini sebagai bentuk pendidikan non-formal yang mampu menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan nasionalisme. Pendekatan berbasis barak militer yang digunakan oleh KDM dinilai efektif dalam membina remaja yang berperilaku menyimpang agar dapat bertransformasi menjadi individu yang lebih baik, kuterarah, dan memiliki integritas kebangsaan. Pendidikan secara tertata tersusun serta saling berhubungan. Pendidikan adalah penyebab terbesar dalam penentuan kualitas bangsa Indonesia. Dengan adanya pendidikan terjadi perubahan yang sifatnya mengalir kedepan. Maka dari itu adanya perubahan pada undang No. 20 Pasal 1 ayat 1 2003.

Anak muda memiliki potensi untuk berkembang menjadi individu yang tangguh, berdaya, dan siap menyongsong berbagai tantangan di masa depan.



Merujuk pada hasil survei yang ditampilkan pada diagram diatas bahwa disimpulkan mayoritas responden memberikan tanggapan Program KDM Barak Militer bertujuan memulihkan jati diri pada remaja untuk generasi pewaris bangsa, melalui pendekatan pendidikan berbasis kedisiplinan bukan militerisasi perang. Dari total 30 responden sebanyak 60% menyatakan setuju dan 33,3% sangat setuju, sementara hanya 6,7% yang tidak setuju dan tidak ada yang sangat tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya para peserta survei, melihat program ini sebagai bentuk pendidikan non-formal yang mampu menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan nasionalisme. Pendidikan karakter suatu hal yang harus kita perhatikan terutama pada bentuk perwujudan pendidikan di Indonesia saat ini sedang dalam banyak masalah yang melanggar dari kepatuhan norma dan moral didalam lingkungan masyarakat, yang dimana sering sekali dilakukan generasi muda yang paling utama anak sekolah. Adanya kejadian ini kita bisa melihat bahwa perlu diadakannya sosialisasi didalam sekolah



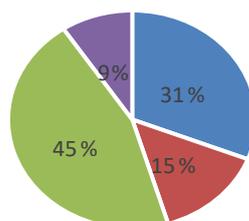
Berdasarkan hasil survei yang ditampilkan pada gambar, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi terhadap program KDM Barak Militer sebagai model pendidikan berbasis kedisiplinan. Sebanyak 53,3% responden menyatakan setuju, sementara 43,3% lainnya menyatakan sangat setuju bahwa program ini efektif dalam memulihkan jati diri remaja serta membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh serta berdaya saing.

Jumlah responden yang menyatakan ketidaksetujuan sangat kecil, yaitu hanya 3,3%, serta tidak adanya responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Menunjukkan bahwa resistensi pada program tersebut relatif rendah dan tidak signifikan. Dukungan kuat dari responden mencerminkan pandangan bahwa pendekatan berbasis kedisiplinan ala militer dapat menjadi alternatif strategis

dalam membina remaja, khususnya mereka yang menghadapi tantangan dalam penyesuaian perilaku dan pola asuh konvensional.

Program KDM Barak Militer dinilai mampu mengintegrasikan nilai-nilai keteguhan, tanggung jawab, dan kemandirian dalam proses pendidikan karakter. Pendekatan ini juga memperkuat peran sosial pemerintah daerah dalam memberikan solusi pendidikan korektif yang tidak hanya bersifat represif, tetapi tetap berada dalam kerangka pembinaan moral dan pendidikan. Dengan demikian, program ini dapat dilihat sebagai bentuk intervensi edukatif yang relevan dalam konteks permasalahan sosial remaja masa kini.

Program KDM mendapat kritik karena siswa yang dikirim ke barak militer tidak mengikuti pendidikan formal selama masa pembinaan, yang berpotensi mengabaikan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan di sekolah



■ Sangat Setuju ■ Setuju ■ Tidak Setuju ■ Sangat Tidak Setuju

Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat kekhawatiran dari masyarakat terkait keberlangsungan hak pendidikan siswa yang mengikuti program KDM di barak militer. Sebanyak 63,3% responden menyatakan tidak setuju terhadap praktik yang menyebabkan siswa tidak mengikuti pendidikan formal selama masa pembinaan. Sementara itu, 13,3% responden sangat tidak setuju, yang menunjukkan penolakan yang cukup kuat terhadap potensi pelanggaran hak siswa untuk mendapatkan pendidikan di sekolah.

Di sisi lain, hanya 20% responden yang menyatakan setuju, dan 3,3% lainnya sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Persentase tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan tingkat ketidaksetujuan, yang menandakan bahwa sebagian besar responden menilai bahwa keberadaan program KDM tidak boleh mengesampingkan kewajiban pendidikan formal siswa.

Temuan ini mencerminkan adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif dari pendekatan disiplin semi-militer yang terlalu dominan, terutama jika tidak diimbangi dengan akses terhadap kurikulum pendidikan yang setara dengan jalur sekolah formal. Hal ini menjadi penting mengingat pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai regulasi.

Oleh karena itu, penting bagi pelaksana program KDM untuk merancang mekanisme pembinaan yang tetap memfasilitasi kegiatan belajar-mengajar secara formal atau setidaknya setara dengan standar pendidikan nasional. Dengan demikian, intervensi kedisiplinan melalui barak militer tidak menjadi penghambat dalam proses pemenuhan hak pendidikan peserta didik.



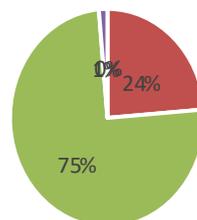
Hasil survei mengungkapkan adanya keresahan dari kalangan orang tua siswa terhadap pelaksanaan program kerja KDM yang dianggap menyimpang dari arah pendidikan nasional. Sebagian besar responden, yaitu 63,3%, menyatakan tidak setuju terhadap program tersebut, sementara 23,3% lainnya menyampaikan ketidaksetujuan yang sangat kuat. Temuan ini memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat menilai pendekatan dalam program KDM berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai dasar pendidikan yang seharusnya mendukung perkembangan karakter dan potensi peserta didik secara menyeluruh.

Sebaliknya, hanya 6,7% sejumlah responden memberikan persetujuan terhadap program tersebut, sementara proporsi lain yang sebanding menunjukkan dukungan yang sangat kuat. Dukungan yang rendah ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program KDM dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan harapan masyarakat, terutama dalam hal penyelarasan antara pembinaan kedisiplinan dan pemenuhan hak pendidikan anak.

Temuan tersebut memperjelas perlunya evaluasi terhadap mekanisme pembinaan dalam program KDM agar tetap mendukung prinsip-prinsip pendidikan yang ramah anak dan berbasis pada kebutuhan perkembangan peserta didik. Pendekatan semi-militer yang dominan harus ditinjau ulang agar tidak menjadi hambatan bagi proses belajar siswa, baik secara akademis maupun psikologis. Oleh sebab itu, penting bagi pihak penyelenggara program untuk merancang strategi pembinaan yang tetap memungkinkan siswa mengikuti pendidikan formal atau memperoleh akses pendidikan yang setara. Dengan

demikian, tujuan pembinaan perilaku tidak bertentangan dengan hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi dan regulasi yang berlaku.

Anakanak yang dikirim ke Barak Militer berisiko mengalami pelanggaran hak asasi karena program ini mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tidak dilengkapi pendampingan hukum maupun psikologis.



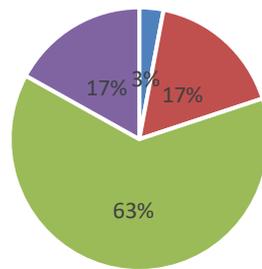
■ Sangat Setuju ■ Setuju ■ Tidak Setuju ■ Sangat Tidak Setuju

Survei terbaru menunjukkan kekhawatiran publik terhadap potensi pelanggaran hak anak dalam program KDM, khususnya saat peserta didik dikirim ke barak militer. Mayoritas responden, yaitu 63,3%, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap praktik tersebut, sementara 16,7% lainnya bahkan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan adanya penolakan yang kuat terhadap kebijakan yang dinilai mengesampingkan kepentingan terbaik bagi anak, terutama karena tidak adanya pendampingan hukum maupun psikologis yang layak selama masa pembinaan.

Di sisi lain, hanya 20% responden yang mendukung pernyataan tersebut, mengindikasikan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang melihat pendekatan ini sebagai solusi yang dapat diterima. Rendahnya angka dukungan ini memperkuat argumen bahwa pendekatan barak militer, apabila diterapkan tanpa perlindungan hukum dan perhatian psikososial, rentan melanggar hak-hak dasar anak.

Kondisi ini menuntut perhatian serius dari penyelenggara program dan pengambil kebijakan. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan masalah perilaku seharusnya tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak. Kehadiran pendamping profesional, baik dari aspek hukum maupun psikologi, menjadi sangat penting guna memastikan bahwa proses pembinaan berlangsung tanpa menimbulkan kerugian emosional atau pelanggaran hak asasi.

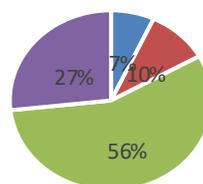
Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan yang jelas dalam melaksanakan program pembinaan melalui barak militer, terutama yang melibatkan TNI dan Polri.



■ Sangat Setuju ■ Setuju ■ Tidak Setuju ■ Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan hasil survei yg ditampilkan pada diagram, dapat disimpulkan mayoritas responden memberi tanggapan Tidak Setuju terhadap pernyataan bahwa Program KDM tidak dapat di campur tangani oleh pemerintha daerah. Pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan terkait pendidikan karakter, termasuk program barak militer untuk siswa bermasalah. Namun, kewenangan ini harus diimbangi dengan koordinasi yang baik dengan pemerintah kabupaten/kota dan mempertimbangkan hak-hak anak

Sebagian masyarakat menilai bahwa program tentang Barak Militer ini terlalu berlebihan karena dengan adanya penekanan anak maka seorang anak tidak mengetahui jati dirinya atau karakter nya.



■ Sangat Setuju ■ Setuju ■ Tidak Setuju ■ Sangat Tidak Setuju

Merujuk pada hasil survei yang ditampilkan pada grafik yang ditampilkan diatas, bahwa mayoritas responden memberi tanggapan tidak setuju terhadap pernyataan Program Barak Militer terlalu berlebihan karena karena terkesan menekan remaja dan tidak mengetahui jati dirinya atau karakternya.

KDM menjamin bahwa program barak militer yang dikembangkannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). KDM menyatakan program ini bertujuan untuk membentuk karakter dan kembalikan jati diri remaja bermasalah melalui pendekatan kedisiplinan, bukan militerisasi perang. Program ini dirancang untuk membangun karakter(kepribadian) dan memngembalikan identitas jati diri remaja bermasalah, dengan fokus pada kedisiplinan dan bukan militerisasi.

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan dengan melibatkan siswa dari SMA Negeri 8 Surakarta, ditemukan berbagai pandangan dan respons yang sangat positif terhadap program yang dijalankan oleh KDM. Siswa menyatakan bahwa program ini memberikan pengaruh yang cukup besar, khususnya bagi mereka yang sebelumnya dikenal memiliki perilaku nakal atau bermasalah. Mereka menilai bahwa program tersebut berhasil meningkatkan disiplin bagi siswa yang sebelumnya kurang tertib. Selain itu, program ini berkontribusi pokok untuk membentuk karakter positif, di mana siswa diajarkan untuk tanggung jawab terhadap setiap perbuatan, keputusan yang mereka ambil. Para siswa merasakan bahwa program ini tidak hanya menekankan aspek disiplin, tetapi juga mendidik nilai-nilai moral dan etika yang penting bagi perkembangan pribadi yang lebih baik. Selain itu, para siswa memberikan dukungan penuhnya supaya program ini dapat terus berjalan pada masa mendatang. Mereka menilai bahwa program ini merupakan solusi yang tepat dan efektif dalam menanggulangi perilaku nakal yang kerap menjadi kendala di lingkungan sekolah. Menurut mereka, metode yang diterapkan oleh KDM sangat berbeda dengan pendekatan pendisiplinan konvensional yang hanya mengandalkan sanksi atau hukuman. Sebaliknya, program ini memberikan ruang dan kesempatan bagi para siswa untuk melakukan refleksi diri dan melakukan perubahan yang positif dan berkelanjutan. Proses pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator KDM dinilai sangat membantu siswa dalam memahami akar permasalahan perilaku mereka dan menemukan solusi yang konstruktif.

Keberhasilan program ini juga sejalan dengan prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan pendidikan di tingkat lokal. Sebagaimana dikemukakan oleh Mr.Bray (di Fasli Jalal, 1997:1) "Otonomi daerah merupakan kebijakan untuk membuat segala keputusan yang memiliki hubungan dengan penggunaan berbagai macam resources yang memiliki tingkat pemerintah yang lebih rendah karena pemberian dari tingkat pemerintahan yang di atasnya." Dalam konteks ini, sekolah sebagai institusi pendidikan di daerah memiliki keleluasaan untuk menjalankan program-program inovatif seperti KDM guna menanggapi permasalahan yang spesifik di lingkungan mereka. Hal ini juga sejalan dengan pandangan S.Wasistiono (1999:7) yang menyatakan bahwa "Otonomi daerah merupakan wewenang yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum untuk mengelola dan menjaga urusan rumah tangganya secara mandiri tanpa campur tangan pihak manapun".

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program KDM tidak hanya mampu menekan angka perilaku negatif siswa, tetapi juga

memperkuat karakter dan kepribadian mereka secara menyeluruh. Keberhasilan program ini di SMA Negeri 8 Surakarta memberikan gambaran optimis bahwa pendekatan serupa dapat diterapkan di sekolah lain untuk membuat lingkungan belajar lebih baik serta mendukung terbentuknya generasi muda berkualitas. Oleh karena itu, kami sarankan agar program ini terus dipertahankan, ditingkatkan, dan disosialisasikan lebih luas lagi agar manfaat positifnya dapat dirasakan oleh lebih banyak siswa di masa mendatang.

SIMPULAN

Kesimpulan, program “Barak Militer” yang di pelopori Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi, merupakan upaya pembinaan karakter remaja bermasalah melalui pendekatan kedisiplinan yang bersifat edukatif. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang melibatkan siswa dan wali kelas di SMA Negeri 8 Surakarta, program ini terbukti mendapat respons sangat positif. Sebanyak 96,7% responden menyatakan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan kedisiplinan, membentuk karakter mandiri, serta menanamkan nilai moral dan etika. Namun, dari hasil penelitian kualitatif melalui kuesioner dan wawancara dengan tenaga pendidik, pelajar, dan orang tua, ditemukan bahwa pelaksanaan program ini menimbulkan persoalan hukum dan tata kelola, terutama terkait batas kewenangan gubernur dalam sistem otonomi daerah. Gubernur sebagai mitra koordinatif tidak memiliki kewenangan langsung atas kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan program ini rawan menimbulkan konflik antarlevel pemerintahan serta dinilai berpotensi melanggar hak anak. Oleh karena itu, program KDM layak untuk terus dipertahankan, ditingkatkan, serta disosialisasikan lebih luas dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip partisipatif, kolaboratif, dan sesuai dengan kerangka otonomi daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sangat tulus kepada seluruh guru dan siswa SMA Negeri 8 Surakarta atas waktu, perhatian, serta kerja sama. Ucapan ini disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dengan mengisi kuesioner, sehingga data yang diperoleh menjadi lengkap dan mendukung keberhasilan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Althafullayya, M. R. (2024). Peran pendidikan karakter untuk generasi muda berdaya tahan dalam mendukung ketahanan nasional: Analisis holistik. *Journal Education Innovation*, 2(1), 55–67.
- Ardiansyah, M. (2022). Implementasi pendidikan karakter melalui program semi-militer di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 101–109.
- Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2021). Research-based character education: A systematic review. *Journal of Moral Education*, 50(3), 321–338. <https://doi.org/10.1080/03057240.2021.1890564>

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dadang, S. (2020). Pasang surut otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 3(2), 41–55.
- Grifol Jeyral, M., Kasingku, J. D., & Warouw, W. N. (2023). Pentingnya pendidikan disiplin dalam membentuk karakter orang muda. *Journal on Education*, 6(1), 17–29.
- Hudi, I., Purwanto, H., Miftahurrahmi, A., Marsyanda, F., Rahma, G., Aini, A. N., & Rahmawati, A. (2024). Menghadapi krisis moral dan etika pada generasi muda Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 1(2), 45–54.
- Jati, W. R. (2021). Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia: Dilema sentralisasi atau desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 221–236.
- Jones, D. E., & Kahn, J. (2021). Discipline-based youth intervention and positive development. *Child Development Research*, 94(2), 455–470. <https://doi.org/10.1111/cdev.13457>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, T., & Rachmawati, D. (2020). Pendekatan pendidikan karakter terhadap anak bermasalah: Studi implementasi di lembaga berbasis militer. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3), 225–232.
- OECD. (2022). *Education policy outlook 2022: Transforming education for the future*. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/edu_outlook-2022-en
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Pratama, Y. D., & Lestari, R. (2022). Model intervensi sosial dalam menangani anak berperilaku menyimpang di tingkat daerah melalui program semi-militer. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(2), 88–95.
- Prihatin, E. S. (2014). Politik hukum otonomi daerah tentang Pemilukada. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 105–118.
- Ritonga, T. (2022). Pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 12–20.
- Samani, M., & Hariyanto. (2013). *Konsep dan model pendidikan karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sari, A. R. (2021). Peran lembaga pendidikan semi-militer dalam membina remaja dengan masalah perilaku. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(1), 35–42.
- Sari, D. N. (2020). Pengaruh program karakter berbasis semi-militer terhadap perubahan perilaku remaja di lingkungan sekolah menengah. *Jurnal Kependidikan dan Sosial*, 4(1), 67–74.
-

-
- Setiawan, R., & Wibowo, A. (2021). Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan disiplin remaja melalui program kedisiplinan semi-militer. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(3), 145–152.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmaningpraja, A., & Santhoso, F. H. (2016). Peran regulasi emosi terhadap resiliensi pada siswa sekolah berasrama berbasis semi militer. *Gajah Mada Journal of Psychology*, 1(3), 77–89.
- Suryadin, A. (2020). Pola pendidikan karakter dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 13(1), 1–14.
- Syahira, S., & Cahyaningtyas, I. (2019). Pembinaan semi-militer sebagai upaya mengatasi degradasi moral terhadap anak didik masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 45–59.
- UNICEF. (2023). *Adolescent mental health and education strategies*. New York: United Nations Children's Fund.
- Wahyu, S. (2019). Penerapan pendidikan karakter melalui kegiatan kedisiplinan siswa. *Jurnal Pendidikan*, 4(1), 67–73.
- World Bank. (2023). *Local education governance and student outcomes in developing countries*. Washington, DC: World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1980-9>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Los Angeles, CA: Sage Publications.
- Yulia, C. (2012). Pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, 1(1), 23–29.